

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DI KOTA MAKASSAR (STUDI PADA SISWA SMA NEGERI 21 MAKASSAR)

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: Iqdam12091996@gmail.com

ABSTRAK. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar (Studi Pada Siswa Sma Negeri 21 Makassar).* Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Imam Suyitno dan Nurharsya Khaer Hanafie. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan data empiris : (1) Tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota di Kota Makassar tahun 2018. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota di Kota Makassar tahun 2018. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif, sumber data primer yaitu informan sebanyak tiga orang. Data sekunder yaitu dokumen. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilihan walikota di kota makassar tahun 2018, di kelompokkan dalam dua kategori. Pertama, partisipasi pemilih pemula dalam Pemilihan walikota Makassar 2018 di SMAN 21 Makassar dari 21 siswa yang terdaftar sebagai pemilih tetap, yang memberikan hak suaranya sebanyak 15 hal ini dikategorikan tinggi. Kedua, Bentuk partisipasi kampanye, hanya dilakukan sebanyak 3 siswa dari 21 yang terdaftar sebagai pemilih hal ini dikategorikan sangat rendah. (2) dalam hasil penelitian ini ada dua Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula. Pertama, faktor pendorong partisipasi pemilih pemula pada pemilihan walikota Makassar tahun 2018 di SMAN 21 Makassar adalah rasa ingin tahu, pengalaman pertama menjadi dorongan pemilih pemula untuk mengetahui lebih dalam proses politik yang akan menentukan daerahnya kedepan. Kemudian kesadaran politik para pemilih pemula, hal ini dikarenakan pemilih pemula di SMAN 21 Makassar mempunyai keinginan untuk mensukseskan pemilihan walikota makassar yang diselenggarakan untuk membawa kota makassar kearah yang lebih baik. sedangkan, sedangkan yang kedua adalah Faktor penghambat partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan walikota makassar tahun 2018 di SMAN 21 makassar adalah kesibukan sehari-hari dan Adanya pertimbangan dari pihak keluarga, ada beberapa cara yang dapat dilakukan Diantaranya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU mesti ditingkatkan dan beserta program-program lain yang dapat meningkatkan minat pemilih pemula untuk mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.

1. Pendahuluan

Tingkat dari partisipasi politik pemilih pemula patut untuk diketahui, mengingat suara dari pemilih pemula juga menentukan dalam suatu pemilihan, terkhusus dalam pemilihan walikota makassar. Seluruh warga kota berhak untuk ikut dalam kemeriahan pemilihan walikota dengan catatan memiliki syarat sebagai pemilih dalam pemilihan tersebut. Saat ini usia pelajar disekolah menengah atas (SMA) kelas sebelas dan dua belas yang kisaran

umurnya berkisar 17-18 tahun sudah masuk kategori pemilih pemula dalam pemilihan walikota sesuai dengan yang tertuang dalam UU No 1 tahun 2015. Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang Pasal 56 ayat 1 Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.¹ Pemilih pemula kebanyakan masih pelajar dari tingkat SMA dan mahasiswa, sehingga permasalahan yang berhubungan dengan pemula-pemula muda, perlu dijaga lebih serius. Karena mereka yang dianggap paling riskan terhadap pengaruh-pengaruh negatif, sehingga dalam pemilihan mereka tidak cukup dipandang sebelah mata, tapi mereka memerlekan pendekatan yang lebih nyata.² Undang-undang no 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dalam pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam pemilihan.³ Turut serta dalam proses penyelenggaraan demokrasi sangatlah penting sebab pemimpin yang terpilih dalam pesta demokrasi sangat menentukan nasib rakyat di daerah tempat terpilihnya. Maka dari itu hal yang amat ditakutkan pada saat diadakannya pemilihan adalah banyaknya masyarakat yang tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya yang disebut dengan golongan putih (*golput*). Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai partisipasi politik atau tidak adanya sosialisasi yang dilakukan KPU kota makassar untuk menarik minat dari masyarakat dalam keikutsertaannya pada pesta demokrasi. Kurangnya proses sosialisasi yang dilakukan dapat menjadi sebuah problem yang menyebabkan pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan walikota. Kurangnya proses sosialisasi ini dapat terjadi pada pemilih pemula yang seharusnya ikut andil dalam kegiatan politik tersebut namun terkendala karena ketidaktahuan serta kurangnya pemahaman dari orang-orang yang masuk kategori pemilih pemula. Besar kemungkinan ini dapat terjadi pada pemilih pemula yang baru pertama kali akan mengikut pemilihan. Kesadaran politik pemilih pemula dapat kita katakan sebagai salah satu faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan takaran seseorang terlibat dalam partisipasi politik. Maka dari itu, sosialisasi politik sangatlah penting untuk dilakukan terkhusus untuk pemilih pemula. Dimasa pertumbuhan dari pemilih pemula kepercayaan-kepercayaan politiknya sangat dipengaruhi oleh teman-teman, keluarga, dan lingkungan. Setiap individu dapat memperoleh orientasi politik dasar pola perilaku politiknya melalui sosialisasi politik dalam rangka mengenal gejala sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Maka dari itu, sosialisasi politik menjadi salah satu faktor penentu tinggi rendahnya partisipasi politik dalam kelompok masyarakat. Meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula di kota makassar merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan dan menyukseskan pemilihan walikota makassar. Selain KPU kota makassar, partai politik dan calon walikota makassar memiliki peran dan kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula guna menambah dukungan dalam pemilihan walikota makassar dan memaksimalkan pemilihan pada pemilih pemula di kota makassar. Kekhawatiran tersebut harus diantisipasi agar tidak ada oknum, pihak, atau kelompok yang memanfaatkan pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan walikota

¹ Undang-Undang No 1 tahun 2015 pasal 56 ayat 1

² Ahmad mufid. "Pentingnya Pemilu dikalangan Pemilih pemula". 25 juni 2018.

<https://ahmadmufidchomsan.wordpress.com/essay/pentingnya-pemilu-dikalangan-pemilih-pemula/>

³ Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 pasal 1 ayat 6

makassar. Hal tersebut yang harus menjadi perhatian penting dan harus diantisipasi oleh KPU kota makassar agar pelaksanaan pemilihan walikota makassar dapat maksimal. Tidak ada salahnya jika hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama, karena pemilih pemula juga berhak menentukan siapa yang pantas memimpin kota makassar kedepan. Pemilih pemula dalam keikut sertaannya dalam dunia politik sangat menentukan kemenangan calon walikota makassar dalam sebuah pemilihan. Oleh sebab itu disinilah peran partai politik dan para calon walikota dalam sosialisasinya untuk mencari dukungan dan meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk turut serta berpartisipasi dan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan walikota makassar. Pemilih pemula hendaknya mengerti apa makna dari demokrasi dan bagaimana mewujudkannya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan pada pemilihan walikota makassar merupakan kegiatan yang berguna bagi kota makassar. Dengan begitu mereka memposisikan dirinya sebagai warga negara yang memiliki kewajiban untuk menggunakan haknya sebagai warga negara. Berdasarkan apa yang telah diutarakan diatas maka penulis tertarik mengangkat judul tentang **“Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota di Kota Makassar (Studi pada Siswa SMA Negeri 21 Makassar)”**.

2. Tinjauan Pustaka

a. Partisipasi Politik

Herbert McClosky mengemukakan pendapatnya bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung (*direct*) atau tidak langsung (*indirect*), dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁴ Batasan pemikiran Closky berada pada ranah tentang proses pemilihan penguasa oleh warga masyarakat.

Bentuk- bentuk partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusioner.

Dilain hal bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda adalah melakukan aksi demonstrasi, pemogokan, dan kegiatan protes. Selain itu metode yang biasa dilakukan pemilih pemula dalam mewujudkan partisipasi politiknya dalam pemilu yaitu dengan cara mengikuti kegiatan kampanye, dan menghadiri diskusi politik.

Indikator terpenting yang dimiliki oleh setiap pemilih pemula yang dianggap melatar belakangi tingkat partisipasi pemilih pemula adalah tingkat pendidikan. Setiap kelompok masyarakat memiliki latar belakang tertentu yang beraneka ragam. Keragaman tersebut yang akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan walikota, dan menjadi bagian dari dinamika perpolitikan di Indonesia. Kegiatan politik yang mencakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bentuk dan intensitasnya sendiri. Dalam konsep yang demikian termasuk diantaranya perbedaan jenis partisipasi. Partisipasi pemilih pemula ketika memberikan suara dalam pemilu, sangat berpengaruh dikarenakan jumlah intensitas yang sangat besar ini disebut dengan partisipasi aktif tidak efektif. Sedangkan partisipasi aktif dan penuh, seperti pada para aktifis politik: pemimpin partai atau kelompok yang memiliki kepentingan jumlahnya sangatlah sedikit.

Pendidikan sangatlah mempengaruhi partisipasi politik dikarenakan pendidikan dapat memberikan pemahaman mengenai persoalan-persoalan politik, serta dari pendidikanlah seseorang dapat mengembangkan kecakapan menganalisa, menciptakan minat, dan kemampuan berpolitik.

Disamping pendidikan dan jenis kelamin, status sosial (ekonomi) juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi

⁴ Ibid hal. 143

dari pada wanita, orang yang berstatus sosial (ekonomi) tinggi, lebih aktif dari pada yang berstatus rendah.⁵

b. Pemilihan Walikota

Dalam Undang- Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum BAB I pasal 1 ayat 1 ditegaskan Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.⁶Pemilihan pemimpin pada tingkat daerah memiliki pengertian Sesuai yang tertera didalam undang-undang no 8 tahun 2015 pasal 1 ayat 1 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.⁷

c. Pemilih Pemula

Pemilihan walikota yang baik dan bersih, mensyaratkan adanya pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran dan bebas dari intimidasi berbagai pihak. Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi dimasa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang terus bertambah, potensi dari daya kritis para pemilih pemula dapat menentukan hasil pemilihan. Berdasarkan undang-undang no 8 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang pasal 1 ayat 6 pemilih adalah penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang sudah terdaftar dalam pemilihan.⁸ Dipertegas dalam UU No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang pasal 57 ayat 1 untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.⁹ Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilihan dalam daftar pemilih dan baru mengikuti pemilu pertama kali serta terdaftar sebagai pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun. Pemilih pemula dalam kategori politik memiliki orientasi politik yang dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu keberadaan pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan, sebagai jalan untuk mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam pemilihan. Menurut M. Rusli Karim kaum muda merupakan kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan salah satu kelompok yang sulit didekati partai politik ataupun konstantan pemilihan. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula cenderung mengikuti tren dilingkungan tempat tinggalnya. Menurut suhartono, pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu

⁵ Mochtar Mas'oed dan Colin Mac Andrew. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*.Yogyakarta:Gajah mada University press, hal.61

⁶ Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 1

⁷ Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 pasal 1 ayat 1

⁸ Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 pasal 1

⁹ Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 57

semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari.¹⁰ Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam pemilihan walikota selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu: Penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Baru mengikuti pemilihan (memberikan suara) pertama kali sejak pemilihan diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan.

3. Kerangka Konsep

Takaran demokrasi suatu daerah dapat ditentukan oleh partisipasi peranan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik. Penentuan arah kebijakan publik dapat dilakukan melalui mekanisme partisipasi politik yang salah satunya dengan melakukan pemilihan walikota secara langsung. Pada kesempatan ini, masyarakat dapat memilih secara langsung calon pemimpinnya yang menurut mereka dapat meningkatkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia serta menciptakan daerah yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkepribadian. Pemilih pemula yang pada dasarnya merupakan golongan pemilih yang baru pertama kali mendapatkan kesempatan memilih dalam pemilihan secara langsung, memang memiliki potensi yang sangatlah besar pada setiap penyelenggaraan pemilihan. Terlebih lagi mereka masih memiliki pengalaman *voting* yang sangat rendah bahkan tidak ada sama sekali, tak heran apabila karakteristik memilih mereka jauh berbeda dengan para pemilih yang telah memiliki pengalaman sebelumnya. Dari Perbedaan karakteristik tersebutlah kemudian menyebabkan timbulnya sebuah dorongan serta motivasi yang berbeda di setiap aktivitas politik mereka, dikarenakan mereka bukanlah organisasi politik maupun kelompok kepentingan. Ketika ada sebuah peluang serta harapan dengan seketika timbullah keinginan mereka untuk bisa berperan serta pada pesta demokrasi dalam bentuk partisipasi politik. Namun tidak semua dari golongan pemilih pemula ini yang sadar akan hak politisnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karakteristik pribadi, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, serta pendidikan politik. Faktor-faktor penghambat tersebutlah yang menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya aparaturnya penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menciptakan upaya demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, sesuai dengan asas pemilihan itu sendiri yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak lupa juga Sekolah sebagai tempat mengenyam pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penyelenggaraan demokrasi yang baik dan benar lewat pemilihan.

4. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan memberi gambaran dan penjelasan yang ilmiah terhadap obyek yang akan diteliti. Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini sebagai bagian dari metode deskriptif, dengan memahami mengapa suatu gejala terjadi atau sebab suatu peristiwa keadaan sesuatu berlangsung. Penelitian ini pada tahap pertama dilakukan dengan menggambarkan fakta untuk memperjelas bagaimana keadaan suatu gejala, suatu peristiwa, atau keadaan dari obyek yang diselidiki. Selanjutnya diusahakan sebab-sebab mengapa gejala peristiwa itu demikian. Untuk itu dilakukan usaha membanding-bandingkan gejala guna mencari kesamaan dan perbedaannya.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹⁰ Muhammad Azzikra. "Tinjauan mengenai pemilih pemula". 31 mei 2018.

<https://muhammadazzikra15.blogspot.com/2016/10/tinjauan-pemilih-pemula.html?m=1>

A. Hasil Penelitian

a. Tingkat Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota di Kota Makassar tahun 2018

Berdasarkan kutipan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik menyatakan bahwa partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni bentuk partisipasi konvensional dan bentuk non konvensional. Yang kemudian menjadi fokus pada penelitian ini yakni bentuk partisipasi konvensional seperti pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Masyarakat Kota Makassar baru saja menggelar Pemilihan walikota dan wakil walikota pada 27 Juni 2018 lalu. Hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal) walikota dan wakil walikota yaitu Munafri arifuddin dan pasangannya Andi Rahmatika Dewi. Dari hasil rekapitulasi suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Makassar, kolom kosong keluar sebagai peraih suara terbanyak dengan 300.795 suara atau 53,23 %, suara kolom kosong mengungguli pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar Munafri arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi.

Berdasarkan hasil wawancara tentang keikutsertaan pemilih pemula di SMAN 21 Makassar dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilihan walikota di Kota Makassar tahun 2018. Didapatkan dari 21 (dua puluh satu) siswa yang terdaftar sebagai pemilih tetap, yang memberikan hak suaranya sebanyak 15 (lima belas) siswa dengan menganggap suara yang diberikan sangat menentukan jalannya sistem pemerintahan kedepan. Dari hasil tersebut dapat kita katakan pengetahuan tentang tujuan dari kampanye sudah cukup tinggi diketahui oleh pemilih pemula di SMAN 21 Makassar.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota di Kota Makassar.

Manakala melihat tingkat partisipasi politik pemilih pemula tentunya penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Sesuai pandangan ahli yang tertera pada BAB II mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dari masyarakat yaitu lingkungan sosial politik tidak langsung seperti media massa. Media massa sebagai salah satu pilar dalam demokrasi dituntut dapat memberikan informasi yang tepat dan dapat menunjang keberhasilan dari pesta demokrasi di daerah terkhusus pemilihan walikota. Pasangan calon tidak mungkin bias menjelaskan visi-misi dan programnya secara lebih intensif apabila media massa tidak dipergunakan. Maka, posisi media massa menjadi sangat penting. Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota di Kota Makassar tahun 2018 tentang pengaruh media massa terhadap partisipasi dari pemilih pemula, Menurut 8 (delapan) dari 21 (dua puluh satu) siswa yang terdaftar sebagai pemilih tetap beranggapan berpengaruh, bahwa media massa berguna untuk lebih mengetahui informasi mengenai profil dan visi misi dari calon walikota Makassar.

a) Faktor Pendorong Partisipasi Pemilih Pemula

Rasa Ingin Tahu, Pemilih pemula adalah kelompok pemilih yang belum/minim pengalaman dalam pesta demokrasi. Dan Pemilihan dalam suatu daerah menjadi sebuah pengalaman sendiri bagi kelompok pemilih pemula. Pengalaman yang sangat minim tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pesta demokrasi lewat sebuah proses pemilihan dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan tersebut. **Kesadaran Politik Pemilih Pemula,** Kesadaran pemilih pemula di SMAN 21 Makassar untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan walikota di Kota Makassar tahun 2018 menjadi hal yang amat penting. Hal ini dapat menunjang perkembangan tingkat partisipasi pemilih pemula. Anggapan pemilih pemula di SMAN 21 Makassar bahwa orang yang sudah cukup umur dan sudah terdaftar dan diberi undangan untuk datang ke TPS adalah suatu keharusan. Seperti yang diutarakan oleh Muhammad Firzan b.r :

b) Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih Pemula

Kesibukan Kegiatan Sehari-hari, Perlu kita ketahui bersama kelompok pemilih pemula yang memiliki rentang usia 17-21 tahun yang berada di kota Makassar, merupakan kelompok yang terangkum dari kalangan pelajar, mahasiswa dan kalangan muda. Terkhusus yang berada di SMAN 21 Makassar yang masih kategori pelajar memiliki rentan usia 17-18 tahun. Peranan pemilih pemula yang sangat komplek dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, hal ini yang menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Mereka lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan mereka daripada ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. **Adanya Pertimbangan dari Pihak Keluarga,** Falsafah ketimuran bagi masyarakat di kota Makassar masih dijunjung dengan teguh. Mereka masih mementingkan keluarga di atas kepentingan yang lain. Jadi ketika anggota keluarga yang lain tidak setuju dengan suatu aktifitas yang kita lakukan, maka lebih baik berhenti melakukannya. Demikian juga dengan aktifitas politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota di kota Makassar tahun 2018, ketika anggota keluarga ada yang melarang maka mereka akan segera mematuhi.

B. Pembahasan

Tingkat Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota di kota Makassar tahun 2018, Herbert McClosky mengemukakan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung (*direct*) atau tidak langsung (*indirect*), dalam proses pembentukan kebijakan umum. Batasan pemikiran Closky berada pada ranah tentang proses pemilihan penguasa oleh warga masyarakat.¹¹ Pemilihan pemimpin pada tingkat daerah memiliki pengertian Sesuai yang tertera didalam undang-undang no 8 tahun 2015 pasal 1 ayat 1 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis. Pemilih pemula yang sebelumnya hanya sebagai penonton proses pemilihan walikota, kini mereka menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seorang pemimpin yang akan menjadi pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemilihan walikota secara langsung merupakan salah satu sarana perwujudan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik itu sendiri dapat dijabarkan ke dalam bentuk aktifitas politik yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Bentuk partisipasi politik seseorang akan tampak dalam aktifitas-aktifitas politiknya. Bentuk partisipasi yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*), entah untuk memilih calon wakil rakyat, kepala negara maupun kepala daerah. Pemilih pemula sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat juga mempunyai andil yang penting dalam suksesnya pemilihan walikota secara langsung. Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh para pemilih pemula tidak berbeda dengan aktifitas politik masyarakat yang lain. Pemilihan kepala daerah serentak 2018 merupakan rangkaian pesta demokrasi masyarakat Indonesia yang akan diteruskan dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta calon legislative ditahun 2019. Oleh karena itu, tentunya diharapkan partisipasi masyarakat kota Makassar terutama pemilih pemula dapat lebih maksimal untuk mensukseskan pagelaran ini. Partisipasi dalam menggunakan hak suaranya oleh pemilih pemula di SMAN 21 Makassar tergolong cukup baik untuk memilih pada pemilihan walikota Makassar di tahun 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dari 21 (dua puluh satu) siswa yang terdaftar sebagai pemilih tetap, yang menggunakan hak suaranya sebanyak 15 (lima belas) siswa. Mereka melakukannya dengan berbagai alasan, antara lain kesadaran politik karena merasa bahwa hal itu adalah suatu kewajiban. Akan tetapi hasil dari penelitian

¹¹ anggara. 2013. *Sisitem Politik Indoneisa*. Cetakan ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia, Hal 143

ini tentunya perlu dianalisis lebih lanjut, Dalam hal perilaku memilih (*voting behavior*) Profil calon walikota Makassar merupakan salah satu aspek terpenting penunjang partisipasi sebagai pegangan awal dalam menggunakan suaranya dan masih sangat minim yang mengetahui profil dari calon walikota makassar. Dari hasil penelitian mengenai sejauh mana pemilih pemula mengetahui profil calon walikota Makassar didapatkan hanya 2 (dua) orang yang mengetahui nama pasangan calon walikota Makassar dari 21 (dua puluh satu) responden sisanya sebanyak 19 (Sembilan belas) hanya mengetahui julukan dari satu pasang calon yang ada. Dilain hal ada 9 (sembilan) responden yang mengartikan salah kolom kosong dengan mengatakan kolom kosong adalah mohammad ramadhan pomanto (walikota Makassar yang masih menjabat) Seperti yang diungkapkan oleh Dirga Anugrah (wawancara, 10 September 2018), pasangan calon walikota yang saya tahu appi cicu dan kotak kosong atau danny pomanto. Hasil tersebut ditambah dengan kurangnya pemahaman pemilih pemula di SMAN 21 makassar terhadap kolom kosong yang juga tertera dalam kotak suara. Kurangnya pemahaman tersebut dapat disebabkan karena belum adanya sosialisasi yang diberikan dan kurang berpengaruhnya faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula. Padahal perihal kolom kosong sudah di atur dalam UU no 10 tahun 2016. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara mengenai pengetahuan pemilih pemula apabila kolom kosong meraih suara terbanyak. Dari 21 (dua puluh satu) responden sebanyak 11 (sebelas) mengatakan tidak tahu dan sebanyak 10 (sepuluh) responden dengan ekspresi ragu mengatakan yang akan menjabat sebagai walikota priode selanjutnya adalah Mohammad ramadhan pomanto. Hal ini dapat dianalisis sebagai berikut, lingkungan sosial politik tidak langsung salah satunya media massa dan lingkungan politik langsung seperti keluarga dan teman kelas kurang mendukung dan memfasilitasi pemilih pemula mendapatkan informasi mengenai pemilihan walikota Makassar 2018. Dilain hal bias saja keinginan untuk menggali informasi tidak dimanfaatkan oleh pemilih pemula. Padahal seharusnya Ketika dihadapkan dengan dengan modernisasi saat ini seharusnya pemilih pemula harus aktif dalam bidang politik, mengingat untuk mengakses informasi sudah sangat mudah dengan dengan dukungan media massa seperti media sosial. Untuk menunjang Partisi pemilih pemula tentunya sosialisasi menjadi sarana tambahan untuk meningkatkan wawasan dan memotifasi dirinya untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan walikota. Terkhusus pemilihan walikota Makassar. KPU Kota Makassar merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk mensosialisasikan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 kepada calon pemilih yang akan memilih dalam pemilihan wali Kota Makassar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan pemilih pemula yang ada di SMAN 21 Makassar dalam kegiatan sosialisasi PILKADA Serentak menunjukkan dari 21 (dua puluh satu) responden hanya 2 (dua) responden yang mengatakan sudah pernah. Fadhli aswar (wawancara, 10 september 2018) mengungkapkan saya sudah pernah mengikuti sosialisai dari KPU, dan baru saya dapatkan sekali yang di adakan di rumah ketua RT daerah saya. Menurut saya itu sangat membantu menambah pengetahuan tentang pemilihan walikota kemarin. Dilain hal pihak sekolah memang mengakui belum ada pihak Komisi Pemilihan Umum yang melakukan sosialisasi di sekolah mereka. Padahal kebanyakan responden mengatak membutuhkan hal tersebut. Dari data diatas dapat kita katakana, sosialisasi dapat menjadi tambahan motivasi pemilih pemula untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan walikota dan juga sebagai tambahan wawasan yang secara nyata dibutuhkan oleh pemilih pemula karena kurangnya pemahan tentang pelaksanaan dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan walikota. Berikutnya bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemilih pemula di kota Makassar adalah kampanye. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang keikutsertaan pemilih pemula dalam kegiatan kampanye, dari 21 (dua puluh satu) siswa yang terdaftar sebagai pemilih di SMAN 21 Makassar 18 (delapan belas) tidak pernah mengikuti proses kampanye. dengan kata lain pencapaian ini tergolong sangat rendah (tidak baik). Sedangkan

sebanyak 3 (tiga) siswa dari 21 (dua puluh satu) yang terdaftar sebagai pemilih mengaku pernah mengikuti kampanye, beragam alasan yang mereka utarakan di antaranya sibuk dengan alasan pribadi, sekolah, dan bahkan ada mengatakan bahwa kegiatan tersebut hanya membuang-buang waktu. Dilain hal ada pula yang beranggapan kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang menyenangkan karena mereka mendapat hiburan selain itu juga mereka dapat memberikan dukungannya kepada calon walikota yang mereka dukung. Bagas wiradinata (wawancara, 10 September 2018) selaku responden yang berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, mengemukakan Saya pernah mengikuti proses kampanye, menurut saya hal tersebut menarik untuk saya ikuti bersama teman-teman saya karena ada beberapa hiburan yang disajikan. Menganalisis pemaparan diatas seharusnya kampanye yang di ikuti oleh masyarakat khususnya pemilih pemula seharusnya menambah pengetahuan baru tentang ilmu politik ataupun visi dan misi calon anggota legislatif nantinya. Namun kebanyakan masyarakat melakukannya karena motif lain, seperti suka dengan keramaian dan konvoi di jalanan. Hal ini jelas bersebrangan dengan tujuan kampanye yang sebenarnya.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat partisipasi yang dilakukan oleh pemilih pemula pada pemilihan walikota Makassar 2018 di kota Makassar sebagai berikut : *Pertama*, pemberian suara (voting) bentuk partisipasi yang satu ini dilakukan oleh sebagian besar pemilih pemula yang ada di SMAN 21 Makassar, memang untuk partisipasi yang satu ini pemilih pemula di SMAN 21 Makassar dikategorikan tinggi (baik) namun untuk pengetahuan tentang Pemilihan walikota makassar 2018 masih sangat minim (kurang) sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum dapat menjadi salah satu solusi dari hal tersebut. *Kedua*, bentuk partisipasi kampanye yang dilakukan oleh pemilih pemula di SMAN 21 Makassar hanya tiga (tiga) responden yang terlibat dari 21 (dua puluh satu) responden yang ada. Keikutsertaan pemilih pemula pada kegiatan ini salah satunya di pengaruhi oleh faktor hiburan, sedangkan untuk alasan memperhatikan isu kampanye sangat minim.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka dapat di simpulkan :

1. Tingkat partisipasi pemilih pemula dalam Pemilihan walikota Makassar 2018 di SMAN 21 Makassar dari 21 (dua puluh satu) siswa yang terdaftar sebagai pemilih tetap, yang memberikan hak suaranya sebanyak 15 (lima belas), hal ini dikategorikan tinggi. Bentuk partisipasi kampanye, hanya dilakukan sebanyak 3 (tiga) siswa dari 21 (dua puluh satu) yang terdaftar sebagai pemilih hal ini dikategorikan sangat rendah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula. (1) Faktor pendorong partisipasi pemilih pemula pada pemilihan walikota Makassar tahun 2018 di SMAN 21 Makassar adalah : *Pertama*, rasa ingin tahu, pengalaman pertama menjadi dorongan pemilih pemula untuk mengetahui lebih dalam proses politik yang akan menentukan daerahnya kedepan. *Kedua*, kesadaran politik para pemilih pemula, hal ini dikarenakan pemilih pemula di SMAN 21 Makassar mempunyai keinginan untuk menyaksikan pemilihan walikota makassar. sedangkan, (2) Faktor penghambat partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan walikota makassar tahun 2018 di SMAN 21 makassar adalah kesibukan sehari-hari dan Adanya pertimbangan dari pihak keluarga.

7. Daftar Pustaka

Anggara, Sahya. 2013. *Sisitem Politik Indoneisa*. Cetakan ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Fakultas Ilmu Sosial. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Hermawan, Eman. 2001. *Politik membela yang benar*. Yogyakarta: Yayasan KLIK

- Maran, Rafael raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Asdi mahasatya
- Mas'ood, Mochtar dan Colin Mac Andrew. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah mada University press
- Mufti, Muslim. 2012. *Teori-teori Politik*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Rahman, A. 2007. *Sisitem Politik Indoneisa*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rudy, T. May. 2003. *Pengantar Ilmu Politik*. Cetakan ke-2. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung,
- Rush, Michael & Philip Althoff. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT raja grafindo persada.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Partisipasi Politik*. Cetakan ke-1. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Subiakto, Henry & Rachman Ida. 2012. *Komunikasi Politik, media, dan demokrasi*. Cetakan ke-1. Bandung: Prenadamedia Group.
- Sugiyano. 2016. *Metode penelitian penndidikan: pendekatankuantitatif, kualitatif*. Bandung: Alfabeta

1) Studi yang Tidak Diterbitkan

- Janji, Lukman. 2014. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013 (Studi Pada Pelajar Ditingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Makassar)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

2) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3) Internet

Ahmad mufid. “Pentingnya Pemilu dikalangan Pemilih pemula”. wordpress.com diakses tanggal 25 juni 2018.

Rudi Cahya Putra. “Partisipasi Politik”. informasiana.com, 15 Januari 2016. Diakses tanggal 30 mei 2018.

Muhammad Azzikra. “Tinjauan mengenai pemilih pemula”. muhammadazzikra15.blogspot.com, 7 April 2015. Diakses tanggal 31 mei 2018.

Wikipedia. “Pemilihan umum walikota Makassar 2013”. wikipedia.org. Diakses tanggal 25 juni 2018.